

PENGUNAAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN BELANJA KAMPUNG HARAPAN MAKMUR DISTRIK KURIK

**¹ Hubertus Oja, ²Novia Eka Ardani; ³Mugi Rahayu; ⁴Adit Miftahudin
Nugraha; ⁵Jeswanti; ⁶Hasnawati Limpo; ⁷Roberthus Ndiken**

¹, Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

²³⁴⁵⁶⁷. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Musamus

Email. noviaeka211104@gmail.com

Received: 08-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 15-12-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan dan pengalokasian serta belanja di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang meneliti publikasi dan sumber yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa. Distribusi dana desa didasarkan pada formula pemerintah yang memperhitungkan ukuran populasi, faktor geografis, dan tingkat kemiskinan. Anggaran tersebut digunakan untuk administrasi desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Papan informasi yang menampilkan alokasi dan realisasi dana yang diletakkan di depan balai desa merupakan cara yang efektif untuk mengomunikasikan transparansi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa publik mendapat informasi. Namun demikian, penelitian ini menemukan kesulitan dengan kompetensi manajer keuangan masyarakat dan cara terbaik untuk memanfaatkan sumber daya. Peningkatan efisiensi pengeluaran desa bergantung pada partisipasi proaktif kepala desa dan personel, serta kemajuan seperti pembentukan koperasi desa. Studi ini menyarankan peningkatan kemampuan manajer keuangan dan keterlibatan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola.

Kata Kunci: Pengalokasian Anggaran; Penggunaan Anggaran; Belanja Kampung

Abstract

This study examines the use and allocation of the budget and expenditure in Harapan Makmur Village, Kurik District, Merauke Regency. This study uses a literature review method by analyzing documents and references related to the management of village funds. The allocation of village funds refers to a government formula that considers population size, geographic conditions, and poverty levels. The budget is used for infrastructure development, community empowerment, and village government operations. Transparency in village fund management is well implemented, communicated through an information board on fund allocation and realization installed in front of the village hall to provide transparency to the community. However, this study found challenges in optimizing budget use and the capacity of village financial managers. The active role of the village head and staff, as well as innovations such as the development of village cooperatives, are key to increasing the effectiveness of village spending. This study recommends increasing the capacity of financial managers and community participation to strengthen governance and support sustainable development.

Keywords: Budget Allocation; Budget Use, Village Expenditure

PENDAHULUAN

Di tingkat dusun atau desa, pengelolaan anggaran desa merupakan komponen kunci dari inisiatif yang ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sosial ekonomi, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Dana ini dimaksudkan untuk dikelola secara transparan, akuntabel, dan inklusif sehingga hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diarahkan sesuai dengan perubahan kebutuhan prioritas di lapangan (PERMENDAGRI, 2014).

Salah satu komunitas yang telah disorot dalam beberapa inisiatif pembangunan dan juga berada di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, adalah Kampung Harapan Makmur. sebuah inisiatif percontohan untuk mempraktikkan Koperasi Merah Putih (KDMP). Melalui pengelolaan kebutuhan dasar dan pembinaan usaha ekonomi lokal, KDMP diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Landasan bagi perubahan ekonomi lokal yang berkelanjutan terletak pada pendirian koperasi ini, yang memberikan optimisme baru kepada warga dalam kemampuan mereka mengendalikan sumber daya masyarakat dan menggunakan anggaran secara lebih efisien (Alberto, 2025), (Nuryani, 2025).

Pemerintah desa telah memasang papan informasi di balai desa yang mencantumkan alokasi dan realisasi dana untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan seluruh masyarakat akses terhadap pemantauan anggaran dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa. Agar pengelolaan keuangan desa mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mendorong inisiatif pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, transparansi ini sangat penting (Pos, 2025).

Namun, masih terdapat kendala utama yang mencegah penggunaan kas desa yang paling efisien. Pembangunan bangunan serbaguna yang berdekatan dengan balai desa misalnya, mengalami kemacetan pengerjaan yang menyebabkan mangkraknya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Proyek ini, yang awalnya dimaksudkan untuk mempromosikan berbagai acara sosial dan budaya yang dapat menumbuhkan persatuan masyarakat dan kegiatan ekonomi, telah terhenti oleh sejumlah faktor teknis dan manajemen anggaran yang tidak efektif, dan faktor-faktor lainnya (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Mangkraknya proyek ini tidak hanya menunjukkan masalah administratif dan teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi

juga menarik perhatian pada kenyataan bahwa masyarakat desa memiliki kemampuan yang terbatas untuk melakukannya, keterbatasan kapasitas SDM untuk pengelolaan anggaran serta minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal, yang seharusnya berpartisipasi aktif dalam memantau dan memantau pelaksanaan program (Raghamat, 2022).

Di beberapa desa di Merauke, termasuk Harapan Makmur, permasalahan kapasitas pengelolaan keuangan desa dan pemahaman yang buruk tentang praktik administrasi keuangan telah menjadi masalah yang sering terjadi . Hal ini berisiko menurunkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran , yang akan membatasi kemampuan dana desa untuk memberikan dampak sebesar-besarnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Elly Nielwaty et al., 2021), (Iek et al., 2024).

Kurangnya pelatihan, pembinaan , dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dan provinsi merupakan permasalahan bawaan lainnya. Kondisi ini menghambat pengembangan kemampuan aparat desa untuk mengawasi keuangan desa dan melaksanakan tugas pengawasan internal yang penting dalam pelaksanaan anggaran (Alberto, 2025).

Keterbatasan ini kemudian berubah menjadi salah satu alasan utama terjadinya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak memadai, terutama dalam pengembangan program pembangunan fisik yang membutuhkan manajemen yang detail dan pengawasan yang cermat. Sehingga, pembangunan yang terhenti di Desa Harapan Makmur adalah representasi dari berbagai masalah yang terkait dengan administrasi dana desa di Papua Selatan.

Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih memiliki fungsi vital dalam membina ekonomi lokal. Namun, keberhasilannya juga sangat tergantung pada seberapa efektif anggaran administrasi desa dapat digunakan dan pelaksanaan yang efisien dari proyek-proyek pembangunan fisik yang mendukung operasi ekonomi koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap prosedur penggunaan dan alokasi anggaran di Desa Harapan Makmur, dengan fokus khusus pada tantangan nyata yang dihadapi, seperti mangkraknya pembangunan gedung fisik serba guna.

Temuan studi ini diharapkan dapat memberikan saran praktis tentang peningkatan pengelolaan anggaran desa, meningkatkan keterampilan pengelola keuangan, dan menjamin pembangunan fisik. Serta memastikan pembangunan fisik dapat terealisasi sesuai target. Sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang Desa Harapan Makmur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan alokasi anggaran serta kendala pelaksanaan pembangunan di Desa Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan berita terkait kondisi lapangan dipilih sebagai cara untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik tersebut.

Data primer diperoleh melalui sumber sekunder yang terpercaya, seperti peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan pengembangan dana desa, bukan dari pengumpulan data lapangan. Laporan evaluasi, dokumentasi proyeksi program Koperasi Merah Putih, serta berita dan artikel terkini yang mengkaji situasi dan kendala di Desa Harapan Makmur. Dengan menggunakan metode kajian pustaka ini, dapat dilakukan analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka untuk membangun gambaran utuh tentang bagaimana dana desa digunakan dan bagaimana pembangunan dilaksanakan.

Sumber data terkini dan relevan, seperti publikasi pemerintah, jurnal akademik, laporan pemerintah, dan media bereputasi, dipilih secara metodis untuk prosedur pengumpulan data. Penilaian komprehensif terhadap semua sumber data dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, transparansi, penggunaan anggaran, serta tantangan dan solusi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Data yang diperoleh kemudian dijelaskan secara kualitatif, menggunakan kombinasi deskripsi, penjelasan, dan interpretasi informasi yang tersedia untuk menarik kesimpulan logis dan metodis serta membuat pernyataan. Pembangunan bangunan serbaguna yang terhenti menjadi contoh konkret yang memungkinkan pemahaman komprehensif tentang lingkungan setempat, yang menunjukkan kesulitan yang terlibat dalam mengelola keuangan desa.

Penelitian ini tidak menguji teori atau melakukan eksperimen, melainkan berfokus pada pemetaan dan penilaian keadaan yang dijelaskan dalam literatur yang menggambarkan keadaan di Kampung Harapan Makmur. Oleh karena itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan saran praktis berbasis bukti bagi pihak-pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan mekanisme alokasi dana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, anggaran desa di Harapan Makmur telah dikelola. Alokasi dana desa ditentukan dengan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, tingkat kemiskinan, dan prioritas pembangunan masing-masing desa.

Dana tersebut digunakan kampung Harapan Makmur untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan, fasilitas sanitasi, dan fasilitas umum, seperti pusat layanan masyarakat dan operasional pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dengan memperkuat kemampuan lokal dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (PERMENDAGRI, 2014), (Pos, 2025).

Kampung Harapan Makmur sangat mengutamakan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Papan informasi mengenai alokasi dan realisasi penggunaan dana dipasang di depan balai desa sebagai langkah konkret, memberikan wadah bagi masyarakat untuk memahami dan mengikutsertakan pemanfaatan anggaran. Hal ini terbukti mendorong keterlibatan publik yang lebih besar dalam pemantauan dan mengurangi kemungkinan defisit anggaran. Meskipun transparansi telah diterapkan secara formal, pemantauan intensif tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan transaksi dan program tidak mengalami hambatan (Pos, 2025).

Terhentinya pembangunan fasilitas serbaguna yang berada di sebelah balai desa merupakan salah satu gambaran paling jelas tentang kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya desa. Kegiatan ekonomi dan sosial warga Harapan Makmur seharusnya ditopang oleh balai desa. Akibat penundaan yang cukup lama dan penghentian pembangunan, sumber daya vital ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Skenario ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kendala teknis, seperti dana yang terbatas, atau salah kelola kemampuan, pelaksanaan dan pengawasan proyek yang tidak memadai (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023), (Raghmat, 2022).

Hasil penelitian serupa menunjukkan bahwa banyak kota di Papua dan daerah lain menghadapi keterbatasan sumber daya, sejalan dengan permasalahan ini. Keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan dan dukungan pemerintah yang belum memadai, serta koordinasi pengelolaan yang belum optimal antara pemerintah desa, distrik, dan kabupaten dalam pendanaan dan pengawasan pembangunan fisik (Elly Nielwaty et al., 2021), (Iek et al., 2024).

Prioritas pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat penting bagi pengelolaan anggaran desa yang efektif dan efisien. Selain itu, untuk menjamin penggunaan dana desa sesuai peruntukannya, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek dan pemanfaatan anggaran, serta pemantauan dan pelaporan yang ketat. Hal ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa bergantung pada manajemen proyek dan partisipasi berbagai pihak dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta kelancaran pelaksanaan

pembangunan (Alberto, 2025).

Pemerintah daerah di Desa Harapan Makmur telah memprioritaskan keterbukaan dalam penggunaan dana sebagai bagian dari pengelolaan anggaran yang baik bagi masyarakat. Pemasangan papan pengumuman alokasi dan pelaksanaan anggaran di balai desa merupakan cerminan dari inisiatif transparansi ini, yang memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap data pengelolaan keuangan. Inisiatif ini tidak hanya mendukung prinsip akuntabilitas, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mendorong pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran tanpa penyalahgunaan dana karena memiliki pemahaman yang jelas tentang alokasi dana (Pos, 2025).

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana, terutama keterlambatan pembangunan fasilitas fisik seperti gedung serba guna, belum sepenuhnya teratasi oleh keterbukaan ini. Karena dianggap membuang - buang waktu dan sumber daya, inisiatif ini menuai banyak kritik publik, yang mengakibatkan kekecewaan dan kurangnya efisiensi penggunaan keuangan desa . Penghentian pembangunan semacam ini dalam literatur manajemen proyek disebabkan oleh perencanaan yang tidak memadai, jadwal yang tidak realistis, dan kurangnya pengawasan teknis dan administratif selama proses pembangunan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Kajian lain menunjukkan bahwa dalam hal sumber daya manusia, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan besar. Banyak perangkat kampung belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam administrasi pembangunan dan pengelolaan keuangan, yang menyebabkan beberapa kesalahan dalam pengelolaan anggaran, seperti dalam pendataan, penyaluran, dan akuntabilitas. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah studi tentang pengelolaan dana desa di Papua dan Papua Barat, hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek dan kegagalan untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan (Elly Nielwaty et al., 2021).

Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan badan pemerintahan tingkat atas seperti kabupaten dan kota, merupakan masalah lain yang memperburuk kondisi ini. Sinkronisasi program dan komunikasi antar lembaga masih kurang, sehingga mengakibatkan tumpang tindih kegiatan atau pengabaian prioritas pembangunan yang seharusnya mendapatkan pendanaan tambahan. Akibatnya, pengawasan lapangan tidak memadai dan anggaran yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal (Iek et al., 2024).

Meskipun transparansi telah diterapkan, peran masyarakat dalam

pemantauan masih kurang. Kemungkinan kontrol sosial atas penggunaan anggaran menjadi tidak efektif karena terbatasnya kesadaran dan akses publik terhadap prosedur pemantauan, serta rendahnya partisipasi publik selama tahap perencanaan. Untuk menjamin akuntabilitas program pembangunan dan keberlanjutannya sesuai rencana, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting (Alberto, 2025).

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan pengelolaan anggaran adalah meningkatkan kompetensi aparatur desa dan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Pemerintah daerah dan organisasi lainnya harus memprioritaskan pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Pembentukan forum warga yang secara aktif terlibat dalam pengawasan anggaran dan peningkatan badan pengawas internal desa merupakan komponen penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Namun, pembangunan infrastruktur yang memadai juga berdampak signifikan terhadap peningkatan standar hidup penduduk desa. Jika dilaksanakan dengan benar, fasilitas seperti bangunan serbaguna, yang seharusnya mendorong inisiatif sosial, budaya, ekonomi, dan tata kelola desa, akan mendorong sinergi yang lebih besar antar warga dan membuat program pemberdayaan masyarakat lebih efektif.

Koperasi Merah Putih (KDMP) di Desa Harapan Makmur diharapkan menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan dasar warga, koperasi ini memungkinkan mereka untuk memulai usaha sendiri dan membantu diversifikasi ekonomi lokal. Keberhasilan koperasi bergantung pada keterkaitan antara anggaran pengelolaan desa dan koperasi, karena setiap pembangunan fisik yang mendukung kegiatan koperasi harus sejalan dengan itu. Hal ini akan menjamin pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan (Pos, 2025).

Efisiensi alokasi dan penggunaan dana di Desa Harapan Makmur sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Penggunaan dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh aparat kampung, perangkat desa dan tenaga teknis. Namun, pada kenyataannya, masih banyak yang membutuhkan peningkatan dalam manajemen proyek pembangunan fisik, pengelolaan keuangan, dan administrasi. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh skenario ini adalah keterlambatan pelaksanaan proyek dan buruknya pelaksanaan anggaran, seperti terhentinya pembangunan Gedung Serbaguna desa (Elly Nielwaty et al., 2021).

Kurangnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat memperburuk keterbatasan

kapasitas sumber daya manusia ini. Akibat pelatihan yang tidak memadai, pemerintah desa kurang memahami peraturan keuangan dan praktik terbaik dalam administrasi anggaran. Akibatnya, pengelolaan dana desa seringkali tidak mematuhi norma akuntansi pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan sejumlah masalah pengelolaan keuangan, seperti potensi penyimpangan, kesalahan administrasi, dan pelanggaran transparansi (Iek et al., 2024).

Lebih lanjut, literatur evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengawasan internal desa yang melibatkan masyarakat secara aktif. Meskipun terdapat papan informasi transparansi, keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa masih belum memadai. Pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa berkaitan erat dengan hal ini. Pendekatan kunci untuk mendorong pengelolaan dana desa yang lebih demokratis dan bertanggung jawab adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi sebagai pengawas (Alberto, 2025).

Kondisi Desa Harapan Makmur menunjukkan permasalahan yang umum terjadi di Papua dan Indonesia, yaitu minimnya kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas menjadi agenda penting yang harus dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan agar anggaran pengelolaan menjadi alat yang efektif dalam mendorong pemberdayaan dan pembangunan masyarakat (Sulpar & Lestari, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia dalam konteks pembangunan fisik juga memengaruhi kualitas pekerjaan proyek, yang mengakibatkan kualitas output yang bervariasi, dan bahkan terkadang di bawah standar. Karena memengaruhi hilangnya infrastruktur dan kepuasan publik terhadap hasil pembangunan, masalah teknis semacam ini membutuhkan respon yang cepat. Masalah yang perlu diperbaiki di semua tingkatan meliputi kesalahan perencanaan, implementasi yang tidak memenuhi standar kualitas, dan penilaian kualitas yang tidak memadai (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Selain melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan dan siapa yang bertanggung jawab, bekerja sama dengan instansi lain juga sangat penting untuk mengelola anggaran desa dengan baik. Di Harapan Makmur, beberapa studi menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang berkomunikasi dengan instansi yang lebih tinggi di tingkat kabupaten dan kota. Kurangnya komunikasi ini memperlambat proses ketika mereka perlu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien (Iek et al., 2024).

Faktor eksternal seperti pengaruh politik lokal dan pengaruh

kelompok kepentingan yang kuat dapat memengaruhi keputusan terkait pemanfaatan dan penyaluran dana desa. Hal ini membutuhkan transparansi dan sistem pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak dikendalikan oleh kelompok kepentingan tertentu (Raghmat, 2022).

Peningkatan keterampilan pengelola keuangan desa sangat penting untuk mengatasi masalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu mendukung pelatihan rutin dan terorganisir yang sesuai dengan kebutuhan nyata para pengelola ini. Pelatihan harus mencakup topik-topik penting seperti pengelolaan anggaran, penanganan masalah keuangan, pelaporan yang akurat, dan pengawasan yang tepat di desa. Dengan meningkatkan keterampilan staf, aparatur desa dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih bertanggung jawab, mengurangi kesalahan, dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari masyarakat terhadap program-program yang mendukung pembangunan (Elly Nielwaty et al., 2021).

Pemerintah kabupaten melalui dinas terkait perlu memberikan pendampingan teknis secara rutin untuk memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan. Pendampingan ini juga memberikan kesempatan bagi para pejabat desa untuk berdiskusi dan menemukan cara untuk memecahkan masalah nyata yang mereka hadapi, seperti melaksanakan proyek dan membantu pertumbuhan ekonomi desa. Mendapatkan pengawasan yang kuat dari pihak eksternal seperti inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Desa (DPMK) akan memperkuat sistem pengendalian dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih baik (Iek et al., 2024).

Kolaborasi antara aparatur kampung dan masyarakat melalui forum musyawarah sangat penting untuk pengelolaan dana desa yang efektif. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam musyawarah desa menjamin transparansi dan menyusun prioritas yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan, hal ini menciptakan tekanan konstruktif untuk inisiatif pembangunan yang tepat waktu, berkualitas tinggi, dan memberikan hasil nyata. Hal ini juga mencerminkan demokratisasi pengelolaan sumber daya lokal (Alberto, 2025).

Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Harapan Makmur. Koperasi ini berperan penting dalam mendorong perekonomian lokal dengan mengelola usaha bersama dan menyediakan kebutuhan pokok. Keberhasilan koperasi bergantung pada kualitas fasilitas pendukungnya, seperti tempat pertemuan dan jalan, yang

membutuhkan pemanfaatan dana desa yang tepat dan cermat. Untuk berkembang, koperasi membutuhkan rencana anggaran yang jelas dan terbuka. Hal ini membantu memastikan bahwa koperasi dan dana desa bekerja sama untuk mendukung pembangunan desa (Alberto, 2025).

Kolaborasi yang lancar antar kelompok pemerintah di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi sangat penting untuk pengelolaan dana yang baik. Ketika kelompok-kelompok ini berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif, proyek pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat dan masalah baru dapat diatasi. Menjaga proses koordinasi tetap kuat dengan meningkatkan hal-hal seperti pelaporan bersama dan akuntabilitas yang jelas merupakan hal yang perlu dilakukan secara berkala. Hal ini membantu memaksimalkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan hasil pembangunan secara keseluruhan (Elly Nielwaty et al., 2021).

Evaluasi akhir anggaran pengelolaan desa di wilayah Papua menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa secara umum dinilai efektif, dengan capaian pembangunan yang signifikan. Namun demikian, di Desa Harapan Makmur, beberapa tantangan masih ada, seperti keterlambatan proyek pembangunan fisik, termasuk pembangunan gedung serbaguna yang tidak selesai sesuai jadwal. Hal ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menyoroti kendala dalam realisasi anggaran proyek desa, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya kesiapan aparat desa, serta kelemahan koordinasi dan pengawasan (Christoffel et al., 2022).

Penanganan isu-isu ini telah menjadi fokus berbagai lokakarya dan sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKP) Papua, termasuk di Jayapura. Kegiatan-kegiatan ini, yang ditujukan bagi bupati, kepala desa, asisten desa, dan tenaga ahli kabupaten, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dan penyelesaian proyek-proyek fisik (Imel, 2025).

Pemerintah Provinsi Papua secara rutin mengadakan rapat mingguan untuk memeriksa penggunaan anggaran dan memastikan dana dialokasikan sesuai kebutuhan. Mereka juga berupaya mengubah anggaran jika diperlukan dan menemukan cara untuk menggunakan dana secara lebih bijak guna mencegah pemborosan dan berfokus pada proyek-proyek pembangunan yang paling penting. Rapat-rapat ini membantu menghindari masalah seperti proyek yang terhenti di tengah jalan dan memastikan dana digunakan sebaik mungkin (Pemerintah Provinsi Papua, 2025).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, Desa Harapan Makmur perlu lebih fokus dalam membantu para pejabat desa mengembangkan keterampilan pengelolaan keuangan yang lebih baik

melalui pelatihan, bimbingan, dan pengawasan rutin. Hal ini akan membantu desa menjadi lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal yang mendorong praktik yang bertanggung jawab dan transparan (Ucok Pardosi et al., 2020).

Pengalaman dalam mengelola dana di desa-desa lain menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih baik dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Desa Harapan Makmur dapat mengambil inspirasi dari contoh-contoh sukses ini untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara keseluruhan (Purba et al., 2024).

Pengelolaan dana desa di Desa Harapan Makmur telah menunjukkan kemajuan positif dalam proses perencanaan dan transparansi. Namun, keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan fisik, seperti Gedung Serbaguna, menunjukkan perlunya peningkatan substansial dalam keterampilan teknis, koordinasi, dan pemantauan proyek. Peningkatan aspek-aspek ini diharapkan dapat mendorong pembangunan desa berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1: Baliho Penggunaan Dana Kampung Harapan Makmur Tahun 2025

(Sumber: Dokumen Pribadi)



Gambar 2: Gedung Serba Guna Mangkrak Kampung Harapan Makmur

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa cara Desa Harapan Makmur Kecamatan Kurik, mengelola anggaran dan pengeluarannya sebagian besar mengikuti kaidah keterbukaan dan tanggung jawab. Dana desa digunakan untuk membangun sarana fisik, membantu masyarakat, dan menjalankan pemerintahan desa. Namun, terdapat permasalahan besar dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, terutama terkait proyek fisik. Misalnya, proyek gedung serbaguna terhenti karena manajemen yang buruk dan kurangnya pengawasan. Permasalahan lainnya meliputi kurangnya tenaga terampil, kurangnya bantuan teknis, dan kurangnya kerja sama yang baik antar instansi yang menyulitkan pelaksanaan rencana dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan tentang pengelolaan anggaran saja tidak cukup. Para aparatur desa juga membutuhkan keterampilan yang lebih baik, dan masyarakat harus lebih terlibat dalam pengawasan penggunaan dana. Untuk memastikan anggaran desa digunakan dengan baik dan menghasilkan perbaikan yang nyata dan berkelanjutan, penting untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal yang ada, serta terus memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memberikan lebih banyak pelatihan dan pendampingan kepada pengelola keuangan kampung agar mereka dapat mengelola dan melaporkan anggaran dengan baik. Pendampingan ini tidak hanya berhenti pada ide dan teori, tetapi juga menyertai pelaksanaan kegiatan dan pengawasan proyek. Koordinasi antar instansi perlu diperkuat dengan lebih baik untuk mempercepat proyek pembangunan fisik dan memastikan dana belanja kampung tersalurkan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat. Selain itu pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemanfaatan anggaran sangat penting untuk membantu menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, M. R. (2025). *Ketika Harapan Hampir Padam, Koperasi Merah Putih Menyalakan Semangat Masyarakat*. Barometer.
- Christoffel, Yusi Eva Batubara, & I Gede Pastina Widagda. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Pada Kampung Dekai Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 14(3), 169–178. <https://doi.org/10.54783/jv.v14i3.639>
- Elly Nielwaty, Wasiah Sufi, & Zainal Arifin. (2021). Transparansi

- Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKam) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 160–169. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i3.59>
- Iek, M., Maray, L. Z., & Iek, A. S. P. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Dana Kampung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 22–32. <https://doi.org/10.55264/jumabis.v8i1.148>
- Imel. (2025). *Kepala Distrik dan Kampung Mampu Kelola Dana Desa Dengan Benar*. Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2023). Laporan Kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah II Provinsi Papua. <Http://Kemdikbud.Go.Id/>, 4(Januari), 197. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021>
- Nuryani. (2025). *Papua Selatan Pos - Kampung Harapan Makmur di Papua Selatan Jadi Pilot Project Kopdes Merah-Putih*. Papua Selatan Pos.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2025). PJ Gubernur Papua Dorong Percepatan Realisasi APBD, Maksimalkan Dampak Nyata Bagi Masyarakat. In *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025* (pp. 1–167). Pemerinah Provinsi Papua.
- PERMENDAGRI. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Pos, P. S. (2025). *13 Kampung di Merauke Sudah Membentuk Koperasi Desa Merah Putih, Puluhan Lainnya Menyusul*.
- Purba, N. S., Saputro, E. R., Saragih, D. P., & Facunda, B. (2024). Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Man Way Bob Distrik Muting Kabupaten Merauke. *Journal Of Political and Development Issue*, 1(1), 94–113.
- Raghat. (2022). *Pembangunan Gedung Serba Guna Di Desa Semundam Diduga Mangkrak*. Satujuang.
- Sulpar, & Lestari, A. I. (2024). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Evaluation of Village Fund Management in Increasing Village Income in Pakeng Village , Lembang District , Pinrang Regency. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(1), 30–33. <https://jurnal-fisip.uim->

Ucok Pardosi, Ermaya Suradinata, & Rossy Lambelanova. (2020). Kinerja Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kampung Nohon Distrik Passue Kabupaten Mappi Provinsi Papua. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 723–730. [https:// doi.org/10.54783/jv.v12i4.335](https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.335)